

**PENGARUH BELANJA MODAL DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP  
KINERJA KEUANGAN DAERAH DENGAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI**

**Larasati Indriastuti<sup>1</sup>**  
**Bambang Satriawan<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Batam  
larasati2912@gmail.com

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh belanja modal dan dana perimbangan terhadap keuangan daerah. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel moderasi yang memoderasi hubungan Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau. Populasinya adalah 7 kabupaten/kota di Kepulauan Riau yang dijadikan sampel dengan periode observasi tahun 2011-2017. Penelitian ini menggunakan analisis regresi parsial (Partial Least Square/PLS) untuk menguji kelima hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Setiap hipotesis akan dianalisis menggunakan software Smart PLS 2.0 untuk menguji hubungan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang ditunjukkan dengan nilai t-statistik sebesar 0,029 lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 1,674. Dana Perimbangan memperoleh p-value sebesar 0,001 dengan nilai t-statistik  $3,203 > 1,674$  yang berarti Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan tingkat signifikansi di atas 5% (signifikan). Hasil pengujian Pendapatan Asli Daerah (PAD) memoderasi hubungan Belanja Modal memperoleh p-value sebesar 0,347 dengan nilai t-statistik  $-0,941 < t\text{-tabel } 1,674$  yang berarti variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memoderasi hubungan antara Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). hubungan antara Belanja Modal sebesar 0,85% yang tidak berpengaruh signifikan dengan signifikansi terhadap Kinerja Keuangan Daerah di atas 5% (signifikan). Pendapatan Asli Daerah (PAD) memoderasi hubungan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan nilai p-value sebesar 0,727 dengan nilai t-statistik sebesar  $0,349 < 1,674$  yang berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD) memoderasi hubungan Dana Perimbangan yang mempunyai hubungan antara Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Daerah. tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan tingkat signifikansi dibawah 5% (signifikan). Nilai F tabel berada pada signifikansi 5% dengan  $df_1 = 3$  dan  $df_2 = (49-3)$  sebesar 2,84. Nilai Fhitung variabel kinerja keuangan daerah (12,31) lebih besar dari ( $<$ ) nilai Ftabel (2,84), dengan hasil ini terdapat pengaruh timbal balik antara variabel Belanja Modal, Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Kata Kunci : Belanja Modal, Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah

**Abstract**

*The purpose of this study was conducted to determine the effect of capital expenditures and balancing funds on regional financial. To find out Regional Original Income (PAD) as a*

*moderating variable that moderates the relationship between Capital Expenditures and Balancing Funds on Regional Financial Performance in Regency and City Governments in the Riau Archipelago Province. The population is 7 districts/cities in the Riau Archipelago which were sampled with the 2011-2017 observation period. This study uses partial regression analysis (Partial Least Square / PLS) to test the five hypotheses proposed in this study. Each hypothesis will be analyzed using Smart PLS 2.0 software to examine the relationship between variables. The results showed that Capital Expenditures had no significant effect on Regional Financial Performance, as indicated by the t-statistic value of 0.029 which is smaller than the t-table value of 1.674. Balancing Funds obtained a p-value of 0.001 with a t-statistic value of 3.203 > 1.674, which means that Balancing Funds have a significant positive effect on Regional Financial Performance with a significance level above 5% (significant). The test results for Regional Original Income (PAD) moderate the relationship between Capital Expenditures obtaining a p-value of 0.347 with a t-statistic value of -0.941 < 1.674 t-table which means that the Regional Original Income (PAD) variable moderates the relationship between Capital Expenditure of 0.85% which has no significant effect with significance on Regional Financial Performance above 5% (significant). Local Own Revenue (PAD) moderates the relationship between Balancing Funds on Regional Financial Performance with a p-value of 0.727 with a t-statistic value of 0.349 < 1.674 which means that Regional Original Income (PAD) moderates the relationship between Balancing Funds that has no significant effect on Regional Financial Performance with a significance level below 5% (significant). The F table value is at 5% significance with  $df1 = 3$  and  $df2 = (49-3)$  of 2.84. The Fhitung value of the regional financial performance variable (12.31) is greater than (>) the Ftable value (2.84), with this result there is a mutual influence between the variables Capital Expenditures, Balancing Funds on Regional Financial Performance.*

**Keywords** : Capital Expenditures, Balancing Funds, Regional Financial Performance, Regional Original Revenues.

## **PENDAHULUAN**

Menurut Undang-undang No.32 tahun 2004 dan UU No.33 tahun 2004 pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya jelek. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip value for money serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Upaya pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga

diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut (Nugroho, 2012).

Untuk dapat mewujudkan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk pengembangan dan pembangunan suatu daerah. Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Alokasi penggunaan anggaran pemerintah daerah termasuk untuk Belanja Modal dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori utama (Syarif, 2010) yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Belanja Modal Fisik Lainnya. Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik.

Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan asset tetap yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Alokasi belanja modal dibentuk melalui proses penyusunan anggaran. Tentunya dalam pengalokasian belanja modal sebagai pendukung proses pembangunan, peran proses penganggaran sangatlah signifikan. Penggunaan pendekatan penganggaran berbasis kinerja tentunya akan semakin berpengaruh dalam penetapan tujuan dan outcome hingga akhirnya dijelaskan kedalam angka-angka pada pos belanja modal APBD.

Dana Perimbangan juga merupakan salah satu sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah. Penyerahan sumber keuangan Daerah baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan Urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Pajak dan retribusi daerah yang menjadi komponen utama dari PAD juga terpengaruh akibat terjadinya krisis ekonomi. Menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat akibat adanya krisis ekonomi menyebabkan terganggunya penerimaan masyarakat yang kemudian mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah yang mengakibatkan pendapatan daerah menjadi lebih rendah dan tidak menentu. Dengan keadaan pemerintah yang mengalami tekanan keuangan mengakibatkan penyusunan APBD menjadi tidak pasti sehingga menyebabkan kemungkinan adanya pergeseran pada komponen-komponen pendapatan dan belanja daerah. Tekanan keuangan (fiscal stress) berakibat pada tidak stabilnya kesiapan Pemerintah Kabupaten dan Kota terutama pada segi keuangannya, kinerja keuangan merupakan salah satu tolak ukur dan kesiapan suatu daerah dalam menghadapi otonomi daerah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, maka pemerintah daerah harus memperbesar ruang fiskal daerah. Pemerintah daerah harus lebih fokus pada upaya-upaya

peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali potensi dan sumber daya daerah yang belum dimanfaatkan dengan maksimal, yang pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian daerah. Dengan meningkatnya kemandirian, otomatis tingkat ketergantungan dapat direduksi. Peningkatan pendapatan asli daerah melalui peningkatan tarif pajak hendaknya dipertimbangkan kembali karena peningkatan PAD melalui cara ini sangat beresiko terhadap penurunan arus investasi yang masuk ke daerah dan akan berpengaruh pada kinerja keuangan daerah.

## **TINJAUAN LITERATUR DAN HIPOTESIS**

### **Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensipotensi kinerja yang akan berlanjut Nugroho dan Rohman, (2012). Menurut Agustina (2013) Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang menggunakan indikator Realisasi Pengeluaran dan Realisasi Penerimaan. Kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio efisiensi sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

### **Belanja Modal**

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 (2011), belanja modal (*Capital Expenditure*) adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap, inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja modal adalah belanja pemerintah atau pengeluaran yang yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Kepulauan Riau, dimana indikator dari belanja modal tersebut adalah Total Belanja Modal dan Total Belanja Daerah.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Perubahan alokasi belanja ditujukan untuk pembangunan berbagai fasilitas modal. Pemerintah perlu memfasilitasi berbagai aktivitas peningkatan perekonomian, salah satunya dengan membuka kesempatan berinvestasi. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Halim (2011) Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

### **Dana Perimbangan**

Dana perimbangan mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) (BPK, 2017). Pengukuran ini dipilih karena *Intergovernmental Revenue* (IGR) merupakan bagian dari pendapatan yang berasal dari lingkungan eksternal bukan pajak. Dana perimbangan proksi dari *Intergovernmental Revenue* dengan perhitungan total dana perimbangan dari pemerintah pusat kemudian dibagi total pendapatan x 100%, Setyaningrum, (2012).

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada provinsi Kepulauan Riau, dimana indikator dari dana perimbangan tersebut adalah Total Dana Perimbangan dan Total Pendapatan.

### **Hipotesis**

- H1 : Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau.
- H2 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau.
- H3 : Belanja Modal dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau.
- H4 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan memoderasi hubungan antara Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau.
- H5 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan memoderasi hubungan antara Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kepulauan Riau.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan data semua data bersifat kuantitatif. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dengan jenis datanya *pooled data*. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumen atau studi dokumentasi. Pengumpulan data berupa dokumen atau studi dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengambil data dari kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau serta melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga/institusi resmi seperti BPS, DJPK, dan KEMENDAGRI untuk meneliti pengaruh variabel *moderating* Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditunjukkan oleh interaksi antara Belanja Modal dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek, subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian diambil kesimpulannya, (Sugiyono, 2011). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga.

Populasi penelitian ini diperoleh dari data-data laporan keuangan daerah dan realisasi anggaran pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari data kuantitatif Belanja Modal, Kinerja Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Daerah.

**Tabel 1**  
**Populasi Penelitian**

No	Tempat dan Populasi Penelitian	Periode Pengamatan	Jumlah Sampel
1	Kota Tanjungpinang	7 Tahun	7
2	Kota Batam	7 Tahun	7
3	Kabupaten Bintan	7 Tahun	7
4	Kabupaten Karimun	7 Tahun	7
5	Kep. Anambas	7 Tahun	7
6	Kabupaten Natuna	7 Tahun	7
7	Kabupaten Lingga	7 Tahun	7
	Jumlah sampel penelitian		49

## HASIL PENELITIAN

### Statistik Deskriptif

Pengolahan data awal dalam penelitian ini, terlebih dahulu menentukan nilai statistik deskriptif untuk mengetahui nilai tertinggi, terendah, nilai rata-rata dan standar deviasi. Hasil pengolahan statistik deskriptif, hal utama yang akan disajikan dalam statistik deskriptif adalah nilai minimum, maksimum, rerata, standar deviasi dan varians dari variabel-variabel penelitian yang digunakan.

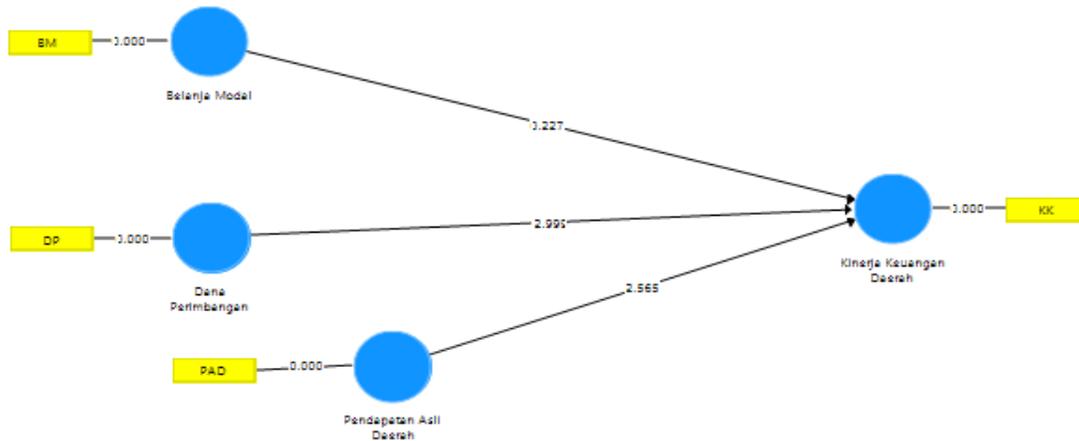
**Tabel 2**  
**Statistik Deskriptif**

	NO.	Missing	Mean	Median	Min	Max	Standar Deviation (STDEV)
BM	1	0	20.735	20.000	9.000	35.000	5.439
DP	2	0	72.939	76.000	24.000	93.000	15.993
PAD	3	0	16.061	13.000	3.000	45.000	13.042
KK	4	0	100.694	102.000	47.000	127.000	11.391

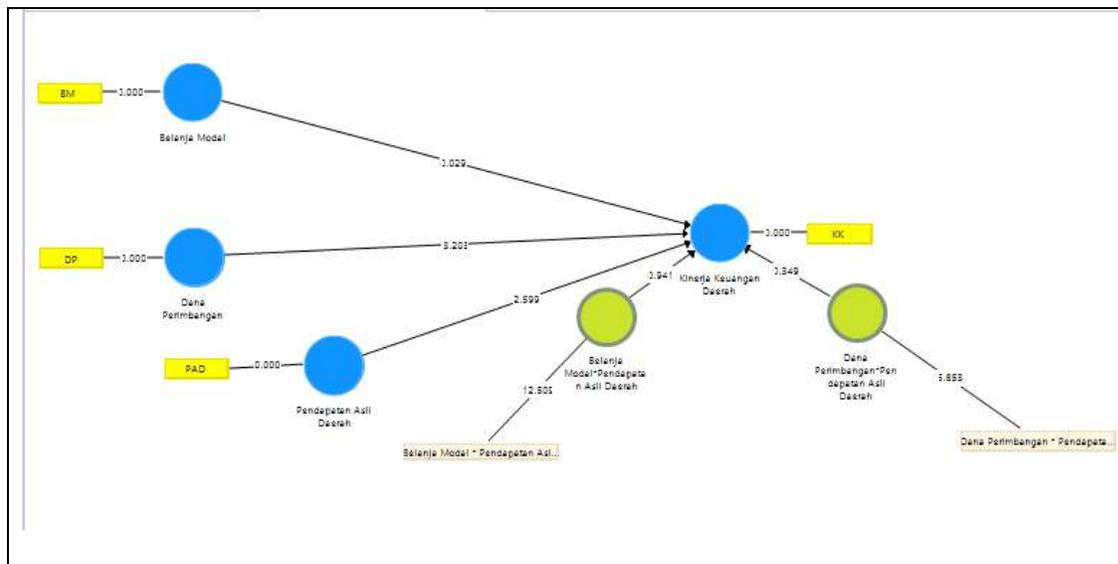
Sumber: Pengolahan data dengan PLS, 2019

Hasil statistik deskriptif dalam tabel 5 dalam bentuk persen, diatas menunjukkan pada variabel dependen Belanja Modal (BM) nilai tertinggi sebesar 35.000 dan nilai terendah 9.000 dengan rata-rata angka Belanja Modal sebesar 20.735 dalam standar deviasi sebesar 5.439. Variabel Dana Perimbangan (DP) nilai tertinggi sebesar 93.000 nilai terendah 24.000 dengan rata-rata sebesar 72.939 dalam standar deviasi sebesar 15.993. Variabel Kinerja Keuangan (KK) nilai tertinggi sebesar 127.000 nilai terendah 47.000 dengan rata-rata sebesar 100.694 dalam standar deviasi sebesar 11.391. Sedangkan variabel PAD nilai tertinggi sebesar 45.000 dan nilai terendah 3.000 dengan rata-rata sebesar 16.061 dalam standar deviasi sebesar 13.042.

**Analisis Data**



Gambar 1– Inner Model Hasil PLS *Boothstrapping*  
 Sumber: Pengolahan data dengan PLS, 2019



Gambar 2 – Inner Model Moderating Hasil PLS *Boothstrapping*  
 Sumber: Pengolahan data dengan PLS, 2019

**Analisa Inner Model**

**Tabel 3**  
**Pengukuran R<sup>2</sup>**

	<b>R-Square</b>	<b>Kriteria</b>
Exogen => Endogen	0,67	Baik
	0,33 - 0,67	Sedang
	0,19 – 0,33	Lemah

Berdasarkan skema *inner model* yang telah ditampilkan pada gambar 4.3 di atas dapat dijelaskan bahwa nilai *path coefficient* terbesar ditunjukkan dengan pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah sebesar 3,203. Kemudian pengaruh yang paling kecil ditunjukkan oleh pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah sebesar 0,029.

Berdasarkan uraian hasil tersebut, menunjukkan bahwa keseluruhan variabel dalam model ini memiliki *path coefficient* dengan angka yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin besar nilai *path coefficient* pada satu variabel independen terhadap variabel dependen, maka semakin kuat pula pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen tersebut.

**Uji R<sup>2</sup>**

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan program smartPLS 2.0, diperoleh nilai *R-Square* sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Hasil Nilai R-Square**

Variabel	Nilai <i>R-Square</i>
Kinerja Keuangan Daerah	0,451

Sumber: Pengolahan data dengan PLS, 2019

Berdasarkan sajian data pada tabel 4.2 di atas, dapat diketahui bahwa nilai *R-Square* untuk variabel kompetensi *account officer* adalah 0,451. Perolehan nilai tersebut menjelaskan bahwa presentase besarnya kompetensi *account officer* dapat dijelaskan oleh audit internal sebesar 45,1%. Hal tersebut maka hasil perhitungan R<sup>2</sup> menunjukkan bahwa R<sup>2</sup> termasuk moderat kategori sedang.

**Uji Q<sup>2</sup>**

Adapun hasil perhitungan nilai *Q-Square* adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Q\text{-Square} &= 1 - (1 - R^2) \\
 &= 1 - (1 - 0,451) \\
 &= 1 - 0,549 \\
 &= 0,451
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh nilai *Q-Square* sebesar 0,451. Menurut Ghozali (2010:167), nilai Q<sup>2</sup> dapat digunakan untuk mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai Q<sup>2</sup> lebih besar dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model dikatakan sudah cukup baik, sedangkan nilai Q<sup>2</sup> kurang dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model kurang memiliki relevansi prediktif. Dalam model penilaian ini, konstruk atau variabel laten endogen memiliki nilai Q<sup>2</sup> yang lebih besar dari 0 (nol) sehingga prediksi yang dilakukan oleh model dinilai telah relevan.

**Tabel 5**  
**Total Construct Crossvalidated Redudancy**

	SSO	SSE	Q <sup>2</sup> (=1-SSE/SSO)
Belanja Modal	49.000	49.000	
Dana Perimbangan	49.000	49.000	
Belanja Modal*PAD	49.000	49.000	
Dana Perimbangan*PAD	49.000	45.729	
Kinerja Keuangan Daerah	49.000	49.000	0.067

Sumber: Pengolahan data dengan PLS, 2019

Nilai Q<sup>2</sup> memiliki besaran di atas nol, sehingga menunjukkan relevansi prediktif model atas variabel laten endogen.

**Tabel 6**  
**Hasil Pengujian F<sup>2</sup>**

	F-Square	Kriteria
Belanja Modal => Y	0,000	Lemah
Dana Perimbangan => Y	0,023	Lemah
BM*PAD => Y	0,557	Menengah
DP*PAD => Y	0,004	Lemah

Sumber: Pengolahan data dengan PLS, 2019

Berdasarkan kriteria tersebut maka dapat dinyatakan sebagai berikut :

- Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja keuangan daerah memiliki F<sup>2</sup> (0,000) Lemah.
- Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja keuangan daerah memiliki F<sup>2</sup> (0.023) Lemah.
- Pengaruh Belanja Modal dimoderasi oleh Pendapatan asli daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah memiliki F<sup>2</sup> (0,557) Menengah.
- Pengaruh Dana Perimbangan dimoderasi oleh Pendapatan asli daerah terhadap Kinerja keuangan daerah memiliki F<sup>2</sup> (0,004) Lemah.

**Tabel 7**  
**Collinearity Statistics (VIF)**

Inner VIF Value	BM	BM*PAD	DP	DP*PAD	KKD
<b>Belanja Modal</b>	-	-	-	-	<b>1.257</b>
<b>Belanja Modal*PAD</b>	-	-	-	-	<b>1.086</b>
<b>Dana Perimbangan</b>	-	-	-	-	<b>9.421</b>
<b>Dana Perimbangan*PAD</b>	-	-	-	-	<b>1.872</b>
<b>Kinerja Keuangan Daerah</b>	-	-	-	-	-

Sumber: Pengolahan data dengan PLS, 2019

#### Uji Parsial (Uji t)

Hipotesis penelitian dapat dinyatakan diterima apabila nilai *P-Values* < 0,05. Berikut ini adalah hasil uji hipotesis yang diperoleh dalam penelitian ini melalui *inner model*:

**Tabel 8**  
**Path Coefficients (T-Statistics dan P-Values)**

Pengaruh	T-Statistics	P-Values	Hasil
Belanja Modal => Kinerja Keuangan Daerah	0,029	0,977	Tidak Diterima
Dana Perimbangan => Kinerja Keuangan Daerah	3,203	0,001	Diterima
Pendapatan Asli Daerah Memoderasi => Belanja Modal	0,941	0,347	Tidak Diterima
Pendapatan Asli Daerah Memoderasi => Dana Perimbangan	0,349	0,727	Tidak Diterima
Belanja Modal + Dana Perimbangan => Kinerja Keuangan Daerah	12,31	-	Diterima

Sumber: Pengolahan data dengan PLS, 2019

Berdasarkan tabel 4.3 maka dapat dinyatakan sebagai berikut :

- Variabel Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel kinerja keuangan daerah dengan nilai p-value  $0,977 > 0,05$ .
- Variabel Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja keuangan daerah dengan nilai p-value  $0,001 < 0,05$ .
- Variabel Pendapatan Asli Daerah memoderasi Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah dengan nilai t- statistics  $0,941$  p-value  $0,347 > 0,05$ .
- Variabel Pendapatan Asli Daerah memoderasi Dana Perimbangan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah dengan nilai t- statistics  $0,349$  p-value  $0,727 > 0,05$ .
- Variabel Belanja Modal dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja keuangan daerah dengan nilai t-satistik  $> t$ -tabel  $12,31 > 2,84$ .

### Pengujian Hipotesis H1

Dari tabel 8 di atas dapat p- value adalah sebesar 0,977 dengan signifikansi diatas 5% yang ditunjukkan dengan nilai t statistik 0,029 lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 1,674. Mengindikasikan bahwa Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa **hipotesis pertama tidak diterima.**

### Pengujian Hipotesis H2

Pengujian kedua dilakukan untuk melihat apakah Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hasil pengujian dapat dilihat dari tabel 8 di atas, Dana Perimbangan memperoleh nilai *p-value* sebesar 0,001 dengan nilai t-statistik  $3,203 > 1,674$  yang berarti Dana Perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan tingkat signifikansi diatas 5% (signifikan). Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa **hipotesis 2 diterima.**

### Pengujian Hipotesis H3

Pengujian hipotesis ketiga ditujukan untuk melihat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) memoderasi hubungan antara Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Berdasarkan hasil pengujian Pendapatan Asli Daerah (PAD) memoderasi hubungan antara Belanja Modal memperoleh nilai *p-value* sebesar 0,347 dengan nilai t-statistik  $-0,941 < 1,674$

t-tabel yang berarti variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memoderasi hubungan antara Belanja Modal sebesar 0,85% berpengaruh tidak signifikan dengan signifikansi terhadap Kinerja Keuangan Daerah diatas 5% (signifikan). Dari hasil regresi hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa **hipotesis ketiga (H3) tidak diterima.**

#### **Pengujian Hipotesis H4**

Pengujian kedua dilakukan untuk melihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) memoderasi hubungan antara Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hasil pengujian dapat dilihat dari tabel 8 di atas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memoderasi hubungan antara Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah nilai *p-value* sebesar 0,727 dengan nilai t-statistik  $0,349 < 1,674$  yang berarti Pendapatan Asli Daerah (PAD) memoderasi hubungan antara Dana Perimbangan berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah dengan tingkat signifikansi dibawah 5% (signifikan). Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa **hipotesis 4 tidak diterima.**

#### **Uji Simultan (Uji F)**

Untuk menentukan nilai kritis (F-Tabel), dengan derajat kebebasan (df), pembilang (df) sebesar (k) dan (df2) untuk penyebut sebesar (n-k) dengan tingkat signifikansi (alpha 5%). Dimana k adalah jumlah variabel bebas dan n adalah sampel, maka bila dalam hasil perhitungan menunjukkan :  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen begitu juga sebaliknya.

$$\begin{aligned}
 F &= \frac{0,451/3}{(1-0,451)/(49-3-1)} \\
 &= \frac{0,15033}{(0,549)/(45)} \\
 &= \frac{0,1503}{0,0122} \\
 &= 12,31
 \end{aligned}$$

Nilai F tabel pada signifikansi 5% dengan  $df_1 = 3$  dan  $df_2 = (49-3)$  sebesar 2,84. Nilai Fhitung variabel Kinerja keuangan daerah (12,31) lebih besar dari (<) nilai Ftabel (2,84), dengan hasil ini maka terdapat pengaruh bersama sama antara variabel Belanja Modal, Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

#### **Uji Residual**

##### **a. Pengujian Hipotesis (H3)**

Pengujian moderasi residual menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai variabel pemoderasi, dengan nilai koefisien parameter regresi pada variabel Belanja modal  $\beta$  sebesar -0,085 dan nilai signifikansi  $t_{hitung}$  sebesar -0,985 lebih besar dari nilai sig  $\alpha$  (0,05) yaitu  $0,330 > 0,05$  artinya bahwa variable Pendapatan Asli Daerah memoderasi hubungan antara Belanja Modal dengan Kinerja Keuangan Daerah tetapi tidak signifikan.

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Residual Belanja Modal**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	19,278	8,721		2,211	,032
kinerja keuangan daerah	-,085	,086	-,142	-,985	,330

a. Dependent Variable: Abs(Res\_1)

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS, 2019

b. Pengujian Hipotesis (H<sub>4</sub>)

Pengujian moderasi residual menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai variabel pemoderasi, dengan nilai koefisien parameter regresi pada variabel Dana Perimbangan  $\beta$  sebesar -0,012 dan nilai signifikansi  $t_{hitung}$  sebesar -0,214 lebih besar dari nilai sig  $\alpha$  (0,05) yaitu  $0,832 > 0,05$  artinya bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memoderasi hubungan antara Dana Perimbangan dengan Kinerja Keuangan Daerah tetapi tidak signifikan.

**Tabel 10**  
**Hasil Uji Residual Dana Perimbangan**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6,208	5,886		1,055	,297
kinerja keuangan daerah	-,012	,058	-,031	-,214	,832

a. Dependent Variable: Abs(Res\_2)

Sumber : Pengolahan data dengan SPSS, 2019

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah :

1. H1 (Hipotesis Pertama) : Belanja Modal berpengaruh tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2011 – 2017.
2. H2 (Hipotesis Kedua) : Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2011 – 2017.
3. H3 (Hipotesis Ketiga) : Pendapatan Asli Daerah memoderasi tidak signifikan hubungan antara Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011– 2017.
4. H4 (Hipotesis Keempat) : Pendapatan Asli Daerah memoderasi tidak signifikan hubungan antara Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011– 2017.

5. H5 (Hipotesisi Kelima) : Secara simultan (bersamaan) variabel Belanja Modal dan Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011– 2017.

#### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis dapat menyarankan kiranya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai :

1. Sumber-sumber bahan kajian bidang akuntansi pemerintahan dan akuntansi- akuntansi sektor publik.
2. Bahan untuk penelitian lebih lanjut maupun perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan rumusan bagi mahasiswa ataupun dosen yang akan meneliti bidang pendapatan asli daerah sebagai variabel pemoderasi, belanja modal, dana perimbangan dan kinerja keuangan daerah.
3. Memberikan rekomendasi dan masukan informasi dalam menyusun kebijakan dan strategi pendapatan asli daerah sebagai variabel pemoderasi, belanja modal, dana perimbangan dan kinerja keuangan daerah pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Bagi masyarakat ilmiah, diharapkan dapat melengkapi temuan-temuan empiris di bidang akuntansi pemerintahan pengembangannya di masa yang akan datang.
5. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan data dengan rentang periode waktu penelitian hingga tahun 2015 karena pada tahun 2015 terjadi defisit anggaran secara nasional yang berimplikasi terhadap penurunan dan pengurangan dana perimbangan kepada seluruh kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
6. Peneliti selanjutnya juga dapat meneliti sumber-sumber penerimaan lainnya yang dapat mempengaruhi besarnya belanja modal dan peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel pemoderasi selain Pendapatan Asli Daerah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim dkk, 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Abdul Halim. 2011. *Analisis Investasi*. Edisi kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdillah, W., & Jogianto. H.M. 2009. Konsep dan Aplikasi PLS (*Partial Least Square*) Untuk Penelitian Empiris. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta. Salemba Empat.
- Bahtiar Arif, Muchlis, Iskandar. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Akademia
- Fahmi, Irham. 2012. Analisis Laporan Keuangan. Cetakan ke 2. Bandung : Alfabeta
- Ghozali, I. Latan, H. 2013. *Partial Least Square : Konsep, Teknik dan Aplikasi SmartPLS 2.0 M3*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2014. *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. Edisi 4. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- HAW. Widjaja. 2009. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom . Jakarta: Rajawali Pers.
- I. Ghozali and H. Latan, *Partial Least Squares\_ : Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan SmartPLS 3.0*, Edisi 2. Universitas Diponegoro, 2015.
- Jogiyanto, H.M., dkk.2009.*Konsep dan Aplikasi PLS (Partial Least Square) Untuk Penelitian Empiris*. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi

- Jan Hoesada. 2014. Melalui . <<http://www.ksap.org/sap/akuntansi-lra-pemda2014/>>.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN. Edisi 3
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo., 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik. Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wulandari, Phaureula artha.dkk. 2018. *Pajak daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta : Deepublish.
- Widiartini, Ketut. 2014. *Otonomi Daerah*. Bali : Universitas Pendidikan Ganesha
- Yuwana, Sony. Suheiry Zein. dan A.R. Azrafiany. 2008. *Memahami APBD dan Permasalahannya*. Edisi 1, Bayumedia. Malang.

### **Daftar Jurnal**

- Amrozi, Imam Akhmad. 2016. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus di Provinsi Jawa Timur). Vol. I, No. 1. ISSN 2502-3764.
- Astiti, Desak Nyoman Yulia & Mimba, Ni Putu Sri Harta. 2016. 'Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah'. vol. 14. no. 3. hal. 1924-1950.
- Ardila, Isna dan Ayu Anindya Putri. 2015. Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Volume 15 (1) : 78 – 85.
- Agustina Oesi, 2013. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang. [Jurnal]. Universitas Brawijaya. Malang.
- Chin, W.W. 1995. *Partial Least Square is to LISREL as Principal Components Analysis is to common Factor Analysis*. *Technology Studies*, 2: 315-319.
- Darwanis dan Saputra. 2014. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh) .*Jurnal Dinamika dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, 183.
- Endah, Vegasari Kusumawati. (2011), Faktor-Faktor yang Menentukan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal di Indonesia Survei pada Pemerintahan Daerah di Indonesia Bagian Barat dan Tengah Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Ebit, Darwanis, Jalaluddin. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Volume 1. Nomer 1.
- Indra, Sigit Lesmana. 2010. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Di Indonesia." *Tesis FE Universitas Negeri Sebelas Maret*.
- Kalnadi, D. 2013, Pengukuran Penerimaan dan Penggunaan Teknologi Pada UMKM Dengan Menggunakan Metode UTAUT. Jurusan Adm. Bisnis, Fakultas ISIP, Universitas Lampung. (unpublish)

- Mulyani, Sri & Hardiyanto Wibowo. 2017. "Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental revenue* Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015)". KOMPARTEMEN, Vol. XV No. 1.
- Nugroho, Fajar dan Abdul Rohman. 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus Di Propinsi Jawa Tengah). Jurnal Akuntansi Diponegoro, Vol. I, No. 2.
- Ni Putu Gina Sukma Antari. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. E Jurnal Managemen: UNUD Vol 7 : 1080-1110
- Rahmayati Anim. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. Jurnal EKA CIDA, Vol. 1 No. 1. ISSN: 2503-3565 e-ISSN: 2503-3689.
- Setyaningrum, Dyah dan Febriyani Syafitri. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia.
- Syaiful. 2010. Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang Dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi Pemerintahan. <http://file.upi.edu/Direktori/L%20%20FPEB/PRODI.AKUNTANSI/196510122001121%20-%20IKIN%20SOLIKIN/Jurnal%20PAD.pdf>. 01;06 pm, Tanggal 2 Nov 2010
- Sularso, havid dan Yanuar E. Restianto. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Jawa Tengah. Media Riset Akuntansi, Vol 1, No.2, Agustus 2011.
- Susantih, heny dan saftiana, yulia. 2009. Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi Se-Sumatera Bagian Selatan. Simposium Nasional Akuntansi XI. Palembang.
- Wenny, Dhia Cerrya. 2012. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota di Provinsi Sumatra Selatan. Jurnal Ilmiah STIE MDP Vol.2, No.I, September 2012. STIE MDP.

### **Sumber lain-lain**

- BPK (2017)
- BPK Kementerian Keuangan RI (2010)
- Kementerian Keuangan RI (2010)
- Peraturan perundang undangan (UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, ayat 18)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan menteri keuangan nomor 101/pmk.02/2011 tentang klarifikasi anggaran
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua

Peraturan perundang undangan (UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1, ayat 18)  
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan  
[www.depkeu.djpk.go.id](http://www.depkeu.djpk.go.id)